

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adjie, H. (2008). *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama.
- Adjie, H. (2011). *Majelis Pengawas Notaris*. Bandung: Refika Aditama.
- Anshori, A. G. (2009). *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*. Yogyakarta: UII Press.
- Dirdjosisworo, S. (2010). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Tinggi.
- Djaja Meliala, (2007). *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*, Bandung: CV.Nuansa Aulia.
- Effendi, R. (1992). *Teori Hukum. Universitas Hasanuddin*.
- Gatot Supramono, (2009). *Perbankan dan Masalah kredit*, Jakarta: PT.Rineka Cipta.
- Gandaprawira dkk, (1985). *Aspek-Aspek Hukum Masalah Perkreditan*, Jakarta Timur: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman.
- GHS. Lumban Tobing. (1996). *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga.
- Hamidi, J. (2006). *Revolusi Hukum Indonesia : Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*. Yogyakarta: Konstitusi Press & Citra Media.
- Harahap, Y. (1986). *Segi-segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni.

- J. Satrio, (2001). *Hukum Perikatan yang lahir dari perjanjian*, Bandung: PT.Citra Aditya Bhakti.
- Kasmir, (2001). *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- M.Ali Hasan, (2004). *Macam-Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Mas, M. (2003). *Pengantar Ilmu Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Miru, A. (2007). *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Munir Fuady, (2014). *Hukum tentang akuisisi, Take over dan LBO*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, (2009), *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nico. (2003). *Tanggungjawab Notaris Selaku Pejabat Umum*. Yogyakarta: Center for Documentation and Studies of Business Law (CDSBL).
- Pamungkasih, R. (2009). *101 Draf Surat Perjanjian (Kontrak)*. Yogyakarta: Gradien Mediatama.
- Prodjodikoro, W. (2003). *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*. Bandung: Sumur.
- R. Soegondo Notodisoerjo. (1993). *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- R. Wirjono Prodjodikoro. (1983). *Asas-Asas Hukum Perdata*. Cetakan Kesembilan. Sumur Bandung.
- Rahardjo, S. (2006). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Rachmat Setiawan. (1999). *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Cetakan Keenam. Bandung.

Ratih Tresnati, E. (2005). *Kamus Istilah Ekonomi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Salim HS, (2015). *Teknik Pembuatan Akta Satu Konsep teoritis kewenangan notaris, bentuk dan minuta akta*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Soekidjo Notoatmodjo, (2003). *Metodologi Penelitian Kesehatan*, Jakarta: Rineka Cipta.

Sukandar, D. (2011). *Membuat Surat Perjanjian*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.

Sunggono, B. (2007). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.

Subekti, (2008). *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermasa.

Supriadi, (2006). *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Sutarno, (2014). *Aspek – Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Bandung: CV. Alfabeta.

Wirjono Prodjodikoro, (1986). *Azas – Azas Hukum Perjanjian*, Bandung: PT. Bale.

Zainul Arifin, (2006). *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Pustaka Alvabet.

Zulfikri Toguan, (2018). *Kepastian Hukum Perjanjian Jual Beli Rumah menurut hukum Syariah*, Pekanbaru: Taman Karya.

Jurnal dan Artikel

Aprilia, S. E. (2024). Pengalihan Debitur Dalam Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Menurut Hukum Tanah Nasional. *Journal Trisakti*, 626-635.

Chrisdanty, F. (2021). Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Pembelian Rumah Yang Belum Dibangun Secara Kredit. *Jurnal Maksigama*, hal 89-103.

Hesty Andreani, (2018). *Analisis Mekanisme Pelaksanaan Take Over pada Pembiayaan Murahabah*, Skripsi, Universitas Islam Negeri syarif hidayatullah, Jakarta.

Mangeswuri, D. R. (2016). Kebijakan Pembiayaan Perumahan Melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, hal 83-95.

Martinouva, R. A. (2023). Akibat Hukum Perjanjian Over Kredit Perumahan Rakyat Bersubsidi Melalui Notaris Menurut Hukum Perdata. *Jurnal Hukum*, hal 165-175.

Nuryanti, W. (2020). Kebutuhan Perumahan di Indonesia: Tantangan dan Solusi. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 145-160.

Rochman, A. (2017). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Transaksi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Di Bank Tabungan Negara Syariah (BTN Syariah) Semarang. *Jurnal Hukum dan Masyarakat Madani*, hal 167-181.

Setyaningsih, dkk., (2018). Peranan Notaris Dalam Pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Terhadap Perjanjian Kredit Antara Kreditur Dan Debitur Dengan Jaminan Hak Tanggungan Di Purwokerto, *Jurnal Akta*.

Valerine J.L. Kriekhoff, dalam Futri Wicaksono BR Surbakti, Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, Muhammad Sofyan Pulungan, 202, *Pembatalan Akta Notariil Yang Dibuat Oleh Notaris Dilakukan Secara Tidak Sah Dan Melawan Hukum (Studi Kasus Di Kota Tangerang)*, Jurnal Hukum tora: 7(3), Jakarta, hal. 340-354.

Yusuf, R.Maryanto, M. (2018) "Peran Notaris Dalam Penggunaan Akta SKMHT Yang Tidak Diikuti APHT Terhadap Debitor Wanprestasi Terkait Pemberian Fasilitas Kredit Pemilikan Rumah Subsidi (Studi Kasus di Bank Tabungan Negara Pekalongan)". *Jurnal Akta* 5,no 1, (2018): 275- 287.

Yunianto, D. (2021). Analisis Pertumbuhan Dan Kepadatan Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi . *Jurnal Forum Ekonomi*, hal 688-699.

Peraturan perundang-undangan

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (*burgelijk wetboek*).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Perumahan Pemukiman.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris .

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Kemudahan dan atau Bantuan Pembiayaan Perolehan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2016 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah